

## **EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN (Studi pada Program Pendidikan Non-Formal di Kota Malang)**

### ***EVALUATION OF LITERACY EDUCATION DEVELOPMENT (Study on Non Formal Education Programs in Malang City)***

**Rosyidatuzzahro Anisykurillah**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
Jl. MT Haryono No.153, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia  
e-mail: rosyidatuz@gmail.com

Diserahkan: 25/12/2019, Diperbaiki, 22/04/2020, Disetujui: 30/04/2020

#### **Abstrak**

Isu permasalahan buta huruf merupakan isu global yang harus segera ditangani. Pendidikan keaksaraan (belajar membaca dan menulis) diukur dengan angka melek huruf (AMH) dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Di Kabupaten Malang terdapat 18.535 orang yang buta huruf. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meningkatkan AMH adalah dengan Program Pendidikan Non-Formal (PNF). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pendidikan keaksaraan melalui program PNF di Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode evaluasi yang digunakan yaitu metode *Context, Input, Process, and Product* (CIPP). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model analysis Miles, Huberman, dan Saldana*. Jika dilihat dari hasil evaluasi menggunakan metode CIPP, masih ada hambatan-hambatan yang harus diselesaikan demi keberhasilan program PNF. Hambatan tersebut diantaranya waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal, kurang kesadaran Warga Belajar (WB) dalam mengikuti program, ketidakmampuan Warga Belajar (WB), sulitnya meyakinkan masyarakat, dan pendataan calon warga belajar yang tidak sesuai harapan.

**Kata Kunci: Evaluasi, Pendidikan Keaksaraan, Program Pendidikan Non Formal**

#### **Abstract**

*Illiteracy is a global issue that must be addressed immediately. In Malang Regency there were 18,535 people who were illiterate. The effort of the Malang Regency Education Office to improve AMH is through Non-Formal Education Program (PNF). The asseement of literacy development program through PNF Program can use Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation assessments. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The purpose of this research is to describe and analyze the evaluation of literacy education through the PNF Program in Malang Regency using the CIPP methods. Data analysis techniques used in this study are interactive model analysis of Miles, Huberman, and Saldana. Based on the evaluation results using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) method, there are still obstacles that must be resolved for the success of the PNF program. These obstacles include learning time that is not on schedule, lack of awareness of citizens in following the program, incapability of citizens, the difficulty of convincing the public, data collection of prospective citizens who fail to meet expectations.*

**Keywords: Evaluation, Literacy education, Non-Formal Education Program**

## PENDAHULUAN

Pembangunan meliputi semua aspek baik itu sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu pembangunan yang mempunyai fungsi strategis adalah pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas manusia sebagai pelaku dari pembangunan sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan suatu negara.

Majoka dan Khan (2017) menyebutkan bahwa sistem pendidikan suatu negara memainkan peran penting dalam kemajuan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk itu, hampir semua negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasionalnya. Dores dan Jolianis (2017) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa jumlah angka melek huruf secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Semakin tinggi angka melek huruf hidup maka akan semakin berkurang jumlah penduduk miskin.

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam pembangunan manusia, bahkan kinerja pendidikan, yaitu gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya (BPS 2017). AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh

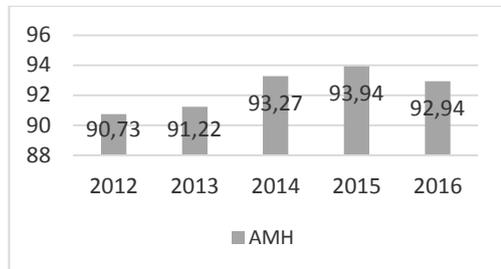
suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Pendidikan keaksaraan ini membawa pengaruh bagi warga belajar baik dalam tingkat sosial maupun dalam tingkat ekonomi (Hartini, Sumarno, dan Hiryanto 2015). Selain itu, penelitian juga menyebutkan bahwa buta huruf merupakan salah satu faktor yang menghambat kualitas sumber daya manusia (Jessica *et al.* 2017).

Pendidikan keaksaraan yang diukur dengan AMH, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Isu permasalahan buta huruf merupakan isu global terutama bagi negara-negara berkembang. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan global juga mempunyai goal untuk meningkatkan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa (usia 15 tahun ke atas). Adapun target yang hendak diwujudkan dalam SDGs, yaitu memastikan kaum muda dan dewasa mencapai tingkat literasi (melek huruf dan angka).

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 rata-rata orang di atas usia 15 tahun di Indonesia yang tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara) adalah 4,27%, masih belum mendekati 0%. Jawa Timur merupakan provinsi yang dikenal memiliki perekonomian yang tinggi tetapi dalam hal pendidikan keaksaraan masih dikatakan belum optimal, termasuk masih tingginya angka buta huruf. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tercatat angka buta huruf untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 7,71%.

Kabupaten Malang sendiri termasuk salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam pendidikan keaksaraan untuk mengurangi angka buta huruf, yang secara otomatis sebagai langkah untuk

meningkatkan AMH. Berdasarkan data statistik Kabupaten Malang, pada tahun 2016 di Kabupaten Malang terdapat 18.535 orang yang buta huruf. Adapun persentase angka melek huruf di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Diagram Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Malang**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2017

Jika dilihat dari gambar di atas pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase dalam Angka Melek Huruf (AMH). Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meningkatkan AMH adalah dengan Program Pendidikan Non-Formal (PNF). Program PNF adalah program satu-satunya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam upaya pemberantasan buta huruf sesuai dengan yang ada pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 berikut ini:

**Tabel 1. Sasaran dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Malang**

Sasaran	Indikator	Program
Meningkatkan AMH diatas usia 15 tahun melalui sarana pendidikan formal dan informal	AMH (15-59 tahun)	Program Pendidikan Non Formal (PNF)

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2016 - 2021

Program PNF menjadi alat untuk membekali warga masyarakat dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya dan kehidupan warga masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat berarti bahwa

Program PNF yang diselenggarakan merupakan konsekuensi dari akibat perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan antisipasi dan penyesuaian. Tohani (2009) berpendapat bahwa Program PNF mampu memberikan manfaat kepada warga belajarnya, mampu menjadikan warga belajar menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, menyebabkan mereka mampu berfikir relevan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, memudahkan mereka untuk bekerja baik mandiri maupun bersama orang lain, dan mampu secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat bahkan mampu membelajarkan masyarakat lain.

Permasalahan pembangunan pendidikan keaksaraan menyangkut kepentingan publik, sehingga merupakan bagian yang harus ditangani dalam manajemen pembangunan. Evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan (Solihin 2012). Riyadi dan Bratakusumah (2004) mendefinisikan evaluasi pembangunan adalah sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas atau suatu proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan, program, kegiatan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Pentingnya suatu evaluasi program menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan – perubahan serta membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan. Mahmudi (2011) mengemukakan evaluasi pendidikan merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pendidikan yang bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Tinjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk memahami, menggali, serta mengkoreksi proses pendidikan tersebut sehingga akan

diketahui celah-celah kekurangan yang harus diperbaiki dan ditutupi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pendidikan keaksaraan melalui Program PNF di Kabupaten Malang dengan metode *Context, Input, Process, and Product* (CIPP). Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam, model ini merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: *Context Evaluation* (evaluasi terhadap konteks); *Input Evaluation* (evaluasi terhadap masukan); *Process Evaluation* (evaluasi terhadap proses); *Product Evaluation* (evaluasi terhadap hasil).

(PNF) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bertujuan untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, menghitung dan menganalisis tematik yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Program PNF tersebut terdiri dari 4 (empat) prinsip yang harus dipahami, yaitu: (a) Konteks lokal, yaitu kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan minat, kebutuhan pengalaman dan budaya lokal serta potensi yang ada di sekitar warga belajar; (b) Desain lokal, yaitu tutor perlu merancang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar sesuai dengan konteks lokal; (c) Partisipatif, yaitu warga belajar berperan aktif; (d) Pemanfaatan hasil belajar, yaitu warga belajar dapat memecahkan masalah keaksaraannya dan meningkatkan mutu serta taraf hidupnya.

Pelaksanaan Program PNF di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Berikut capaian pendidikan keaksaraan dengan indikator sasaran AMH (tabel 2) :

**Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
AMH	99,1%	98,88 %
	(Renstra)	

Sumber : LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2017

Salah satu indikator dari keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah meningkatnya angka melek huruf, dimana pada tahun 2017 ditargetkan 99,1 %, namun capaian untuk angka melek huruf adalah sebesar 98,88 %, artinya ada gap penduduk yang masih buta aksara. Setelah melalui proses pendataan dilapangan, ternyata adanya gap tersebut adalah penduduk usia 45 tahun keatas yang masih buta aksara (LKj Dinas Pendidikan Tahun 2017).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja AMH belum tercapai sesuai target yang direncanakan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebabnya antara lain: (a) Faktor sosial ekonomi serta kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya masih minim untuk mengikuti program keaksaraan, terutama penyandang buta aksara pada usia 45 tahun keatas; (b) Standarisasi indikator buta aksara sesuai peraturan yang ada adalah baca tulis huruf latin, sementara banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang termasuk kategori buta aksara tidak bisa baca tulis huruf latin akan tetapi sangat mahir baca tulis huruf arab (Al-quran); (c) Jumlah anggaran dari APBD yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- pada masing-masing program tahun 2017.

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tersebut, program dan kegiatan yang menunjukkan output pendukung bagi pencapaian kinerja tersebut adalah: Pengembangan Pendidikan Keaksaraan serta Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melaksanakan Program PNF yang meliputi kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup, dan Publikasi dan Sosialisasi PNF (Pendidikan Non Formal). Adapun realisasi ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, target

strategisnya adalah meningkatnya kompetensi dan kemampuan para tutor untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, serta pengentasan buta aksara bagi masyarakat usia produktif. Adapun realisasi kegiatan ini pada LKJ Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah sosialisasi dan pelatihan bagi 200 orang peserta keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan; (b) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup, target strategisnya adalah meningkatnya kompetensi dan kemampuan warga belajar dalam penerapan *life skill*. Adapun Realisasi kegiatan ini adalah memberikan pelatihan, kursus serta kegiatan pembelajaran bagi 150 orang berupa pelatihan tata rias kecantikan dan rambut; (c) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (PNF), target strategisnya adalah meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal. Adapun realisasi kegiatan ini adalah publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum serta melalui keikutsertaan dalam peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Jawa Timur yang diikuti 114 orang.

### Evaluasi Program PNF di Kabupaten Malang

Evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan, yaitu pada saat kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi pada saat kegiatan berjalan, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Model evaluasi yang digunakan, yaitu evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil (*Context, Input, Process, and Product* atau CIPP). Teknik evaluasi CIPP merupakan teknik menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan program ataupun kegiatan pembangunan.

#### Evaluasi Konteks (*Contex*)

Evaluasi konteks merupakan penilaian yang mengarah pada konteks yang terkait dengan lingkungan. Evaluasi ini menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program, yang menyangkut tujuan dan sasaran pelaksanaan program.

Tujuan diselenggarakan program PNF di Kabupaten Malang adalah memberantas buta aksara dan memberikan kesempatan belajar warga masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas yang belum mampu memperoleh pendidikan. Selain itu tujuan program ini, yaitu memberikan bekal kepada warga belajar untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta memberikan wawasan kepada masyarakat akan arti penting belajar dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan. Apa yang menjadi tujuan dari program PNF ini telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat penyandang buta aksara. Adanya kesesuaian tujuan pemerintah untuk memberantas buta aksara dan keinginan masyarakat untuk mau mengikuti proses pembelajaran agar dapat mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta memperoleh keterampilan fungsional.

**Tabel 3. Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
AMH	AMH	310.000.000	0,14 dari alokasi keseluruhan anggaran 2017

Sumber: LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2017

Pendidikan keaksaraan sebagai upaya meningkatkan angka melek huruf menjadi isu prioritas di Kabupaten Malang, tetapi jika dilihat dari komposisi pengalokasian anggaran yang hanya 0,14 %. Padahal, Kabupaten Malang terdapat 18.535. orang buta aksara. Meskipun begitu alokasi anggaran untuk pendidikan keaksaraan dari tahun ke tahun selalu meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 225.000.000 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 310.000.000. Dari segi penyerapan anggaran, persentasenya adalah 100% tetapi dari target indikator capaian hanya 98,88% dari 99,1%.

Meskipun penyerapan anggaran sudah 100% tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang belum mampu

mencapai target kinerja dengan indikator Angka Meleak Huruf. Seringkali muncul anekdot “bodoh jika tidak bisa menghabiskan uang” dikalangan aparatur pemerintah. Anekdot ini muncul karena apabila dana yang telah dialokasikan ternyata tidak dapat digunakan semuanya pada saat tahun anggaran berakhir, maka akan terdapat pemotongan atau pengurangan anggaran pada tahun anggaran berikutnya sebagai “sanksi”. Dana sisa itu dianggap sebagai ketidakefisienan pengakolasian anggaran. Seharusnya dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran terhadap target kinerja.

Guru pengajar program PNF harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan menguasai substansi materi yang akan dibelajarkan. Keaktifan tutor untuk mensukseskan pelaksanaan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak membutuhkan dan tidak merasa rugi walaupun tidak mengikutinya. Melihat hal ini maka tutor sangat berperan untuk memberi motivasi para warga belajar agar memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti proses belajar.

Tutor juga memiliki pengaruh yang besar dalam suksesnya pelaksanaan program. Seharusnya dicari solusi untuk mengatasi sikap warga belajar yang malas untuk mengikuti proses pembelajaran, misalnya dengan memberikan materi yang menarik dan yang disukai oleh warga belajar. Materi yang disampaikan juga harus menyesuaikan dengan keinginan warga belajar dan tidak terpaku pada modul karena kadang materi yang ada pada modul tidak bisa diterima oleh warga belajar, dan warga belajar tidak mau apabila materi yang disampaikan tidak mereka sukai. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi antara tutor dengan warga belajar materi apa yang akan dipelajari.

Sarana prasarana belajar meliputi peralatan-peralatan yang diperlukan dalam menunjang proses pelaksanaan

pembelajaran, seperti alat tulis kantor (ATK) dan buku tematik/bahan ajar. Modul yang digunakan dalam pembelajaran teori keaksaraan merupakan modul yang temanya berkaitan dengan pelatihan keterampilan. Sarana lainnya yang dapat ditemukan berupa kursi, meja, papan tulis, dan spidol yang sudah disediakan. Kegiatan pembelajaran tidak dituntut untuk membayar sedikitpun. Meskipun sarana dan prasarana tersebut sangat standar berupa alat tulis menulis, namun sudah bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran.

### **Evaluasi Proses (*Process*)**

Indikator proses digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan program, meningkatkan motivasi staf, dan memperbaiki komunikasi di antara staf, dan sebagainya, yang dinilai, yaitu apakah pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan apakah muncul hambatan dalam proses pelaksanaan.

Langkah persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang diantaranya sosialisasi dan publikasi serta pendataan calon warga belajar. Dinas pendidikan mensosialisasikan program pada perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk dipublikasikan kepada warga. Hambatan dalam proses sosialisasi, yaitu sulitnya meyakinkan masyarakat untuk mengikuti program. Masih banyak perangkat desa maupun tokoh masyarakat yang kurang respon terhadap apa yang disampaikan oleh dinas pendidikan. Hal itu mengakibatkan data yang masuk ke kantor tidak sesuai yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dinas pendidikan harus selektif dalam memilih perangkat desa yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan program.

Proses pembelajaran program Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi tiga tahapan, yaitu: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II), Tahap Pelestarian (Tahap III). Pada Tahap Pemberantasan

(Tahap I), materi yang diberikan adalah materi dasar membaca, menulis dan berhitung. Setelah melalui tahap I, maka pada tahap II ini warga belajar akan diberi materi pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi dasar yang telah diberikan pada tahap I. Selanjutnya, tutor mengajarkan kepada warga belajar untuk membaca kalimat sederhana. Sedangkan pada tahap III warga belajar diajarkan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks, misalnya membaca dan menulis paragraf sederhana.

Setelah melalui tahap I, maka pada tahap II ini warga belajar akan diberi materi pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi dasar yang telah diberikan pada tahap I. Selanjutnya, tutor mengajarkan kepada warga belajar untuk membaca kalimat sederhana. Tutor juga meningkatkan keterampilan berhitung warga belajarnya dengan mengajari mereka mengoperasikan tanda hitung penambahan (+) dan pengurangan (-). Sedangkan pada tahap III warga belajar diajarkan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks, misalnya membaca dan menulis paragraf sederhana. Sedangkan untuk materi berhitung, tutor mengajarkan cara pengoperasian perkalian (x) dan pembagian (:).

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kelompok belajar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keaksaraan. Pelaksanaan evaluasi melibatkan tutor. Bentuk evaluasinya adalah para warga belajar diberi soal yang telah disesuaikan dengan kurikulum dari dinas pendidikan. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran perlu dilaksanakan evaluasi yang berupa uji kompetensi keaksaraan fungsional, yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

#### **Evaluasi Produk (*Product*)**

Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program sehingga kemudian dapat diketahui dampak dari pelaksanaan suatu program. Dampak, yaitu pengaruh positif maupun negatif yang dapat muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan (Sjafrizal, 2016). Bentuk produk yang dihasilkan secara langsung, baik bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dari pengukuran ini dapat dilihat apakah suatu program dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan semula. Dengan dilaksanakannya program PNF maka dampak sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat adalah masyarakat mampu berinisiatif dan memiliki kemandirian dalam kehidupannya sehingga tidak menggantungkan diri pada orang dan berpikiran untuk maju. Selain itu juga masyarakat sudah memiliki kemampuan keaksaraan sehingga mampu melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keaksaraan dan mampu mengakses informasi dalam bentuk tulisan seperti koran dan majalah.

Setelah pelaksanaan pendidikan keaksaraan, dampak ekonomi bagi masyarakatnya adalah masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan bekal keterampilan yang telah diberikan selama program pemerintah ini berlangsung. Dengan begitu, apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat tercapai. Dampak dari diselenggarakannya pendidikan keaksaraan ini dirasakan warga belajar banyak positifnya. Ketidakmampuan baca tulis sebagian penduduk di Kabupaten Malang erat kaitannya dengan kemiskinan. Melek aksara penting bagi pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Semakin meningkatnya angka melek aksara (literasi), otomatis membawa

dampak ekonomis signifikan bagi individu dan negara.

### **Kendala Program PNF di Kabupaten Malang**

Berdasarkan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) maka dapat diketahui apa yang menjadi kendala program PNF di Kabupaten Malang. Adapun hambatan yang ada dalam Program PNF, meliputi waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal, kurangnya kesadaran warga belajar (WB) dalam mengikuti program, ketidakmampuan Warga Belajar (WB), sulitnya meyakinkan masyarakat, Pendataan calon warga belajar yang tidak sesuai harapan.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga belajar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, buruh, sehingga pada musim tanam dan musim panen banyak warga belajar yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Pada saat musim mata pencaharian tertentu tiba (misalnya musim panen), masyarakat cenderung lebih memilih mencari nafkah dari pada PNF. Dalam proses pembelajaran masih sering terjadi penundaan jadwal belajar, hal itu disebabkan karena banyak warga belajar yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sehingga tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Banyak warga belajar yang tidak mau datang kalau tidak dijemput oleh tutornya sendiri, ada yang malu untuk ikut kegiatan belajar, ada yang dengan alasan banyak pekerjaan maka mereka mengurungkan niatnya untuk belajar, atau bahkan ada yang memang malas untuk ikut belajar.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sering dilakukan penjemputan warga belajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh penyelenggara, para tutor, dan juga Ketua RT. Banyak warga belajar yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sehingga tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Banyak warga belajar yang tidak mau

datang kalau tidak dijemput oleh tutornya sendiri, ada yang malu untuk ikut kegiatan belajar, ada yang dengan alasan banyak pekerjaan maka mereka mengurungkan niatnya untuk belajar, atau bahkan ada yang memang malas untuk ikut belajar. Waktu dan durasi instruksi adalah desain elemen pertama yang paling dipertimbangkan oleh para perencana karena mendikte ruang lingkup dan struktur program. Komitmen administrator dan instruktur dalam implementasi program adalah indikasi yang jelas dari efektivitas organisasi. Daniel dan Ali (2017) menyebutkan bahwa penyelenggara harus selalu ingat bahwa pendidikan keaksaraan orang dewasa bersifat sukarela dan oleh karena itu harus menjadi elemen fleksibilitas dalam manajemen dan organisasinya.

Ketidakmampuan warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran karena kualitas yang masih ada belum optimal dalam menguasai materi yang diberikan. Warga belajar yang sudah melek dapat kembali menjadi buta huruf kalau tidak ada pembinaan. Pendidikan non formal yang bersifat fleksibel dalam pelaksanaan berpeluang sebagai media untuk membelajarkan masyarakat terutama penyandang buta aksara. Fleksibilitas pendidikan non formal dalam hal waktu dan tempat belajar, memungkinkan warga belajar dapat menggunakan waktunya untuk belajar, di luar tugas pokok kesehariannya. Demikian pula kurikulum dan metode serta aturan tidak seketat pendidikan formal. Dengan menggunakan lingkungan serta mengaitkan dengan kehidupan dan kebutuhan hidup, pendidikan non formal dapat dilakukan. Pemberantasan buta aksara pada usia dewasa (15 tahun ke atas) tidak berjalan sendiri, atau hanya untuk target saat ini saja, tetapi mempunyai hubungan sangat erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau kualitas modal manusia, yang diperlukan untuk membangun keluarga, masyarakat atau bangsa.

Hambatan dalam proses sosialisasi, yaitu sulitnya menyakinkan masyarakat untuk mengikuti program ini, karena memang masyarakat merasa tidak membutuhkan pendidikan keaksaraan. Permasalahan yang paling mendasar dalam program PNF, yaitu rendahnya motivasi belajar penduduk yang mengalami buta aksara. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program. Adanya sikap masyarakat yang tidak mau dan malu menginformasikan bahwa ada diantara diri masyarakat yang buta aksara. Di samping itu, masih ada masyarakat yang beranggapan kurangnya manfaat yang dirasakan dari program pendidikan terhadap kehidupan sehari-hari, artinya meskipun berpendidikan belum tentu bisa menjamin kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian masyarakat tidak terdorong untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ini sesuai dengan pendapat Effendi (2005) bahwa pendidikan keaksaraan bukan satu-satunya cara bahkan bukan cara yang terbaik untuk menuntaskan ketunaaksaraan, dan hal-hal yang melingkupinya, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan penduduk. Warga yang terdeteksi masih mengalami buta aksara di Kabupaten Malang rata-rata sudah berusia di atas 45 tahun dan sebagian besar berdomisili di kawasan pedesaan.

Pendataan calon warga belajar merupakan kewenangan masing-masing desa yang dilakukan oleh kepala desanya langsung atau kepala desa menunjuk tokoh-tokoh masyarakat. Masih banyak perangkat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang kurang respon terhadap apa yang disampaikan dinas pendidikan. Hal ini mengakibatkan data yang masuk kantor tidak sesuai yang diharapkan atau hasil pendataan tidak sesuai harapan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dinas pendidikan harus selektif dalam memilih perangkat

desa yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan program PNF dan mendata calon warga belajar, yaitu dengan memilih orang-orang yang mempunyai kerelaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang masih menyandang status buta aksara.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*), maka PNF di Kabupaten Malang masih belum berjalan optimal untuk mencapai target yang sudah direncanakan. Hasil evaluasi *context* menunjukkan sasaran dan tujuan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan; evaluasi *input* menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dinas pendidikan karena dari segi anggaran sudah terserap 100% tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan; evaluasi dari segi *process* menunjukkan program berjalan lancar; dan evaluasi dari segi *product* membuktikan bahwa program memberikan dampak positif bagi masyarakat penyandang buta aksara.

Hambatan yang ada dalam program PNF adalah waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal, kurangnya kesadaran Warga Belajar (WB) dalam mengikuti program, ketidakmampuan Warga Belajar (WB), sulitnya meyakinkan masyarakat, dan pendataan calon warga belajar yang tidak sesuai harapan. Untuk memaksimalkan keberhasilan program dan program dapat berjalan secara berkelanjutan maka hambatan-hambatan tersebut harus diatasi.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi terhadap pelaksanaan program PNF di Kabupaten Malang, antara lain: (a) memberikan pendampingan secara terus menerus kepada penyandang buta aksara agar yang sudah melek huruf tidak kembali

buta aksara dan yang masih buta aksara terus dilakukan penanganan (keberlanjutan); (b) meningkatkan kemampuan tutor baik dalam hal substansi materi maupun pengelolaan pembelajaran (administrasi, penerapan multimedia, multimetode dan memberikan umpan balik); (c) melakukan sosialisasi rutin di tiap desa tentang manfaat program-program pendidikan keaksaraan agar dapat menjangkau warga buta aksara secara lebih maksimal dan menjadikan mereka mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mengikuti program-program pemerintah; (d) dinas pendidikan harus selektif dalam memilih perangkat desa yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan Program Pendidikan Non Formal (PNF) dan mendata calon warga belajar, yaitu dengan memilih orang-orang yang mempunyai kerelaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang masih menyandang status buta aksara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2009. *"Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor"*. Jakarta: Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- BPS. 2017. *"Badan Pusat Statistik Tabel Dinamis"*. Jakarta: Katalog BPS.
- BPS Prov. Jawa Timur. 2017. *"Provinsi Jawa Timur Dalam Angka"*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Daniel, Aminchi, dan Ali. 2017. "An Overview of Timing in Organizing and Implementing of Adult Literacy Programme and Its Implications For Adult Education Administration In Nigeria." *International Journal of Development Research* 7 No. 2: 15543-15545.
- Dinas Pendidikan Kab. Malang. 2017. *LKj Tahun 2017*. Malang: Dinas Pendidikan Kab. Malang.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 2016. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.
- Dores dan Jolianis. 2017. "Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Barat". *Journal of Economic and Economic Education Volume 2* (2). 126-133.
- Hartini, Sumarno, dan Hiryanto. 2015. "Dampak Pendidikan Keaksaraan terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga". *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta Edisi XVI No.2*. 73-179.
- Jessica, Halis, Ningsi, Virginia, Firsty, dan Syahidah. 2017. "Pemberantasan Buta Aksara untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Sekitar Hutan Desa Manipi, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamas". *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3* (2). 136-142.
- Junarto, Subar dan Kusna. 2018. "Evaluasi Program Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dengan Model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) INKLUSI". *Journal of Disability Studies Vol. 5* (2). 179-194.
- Mahmudi. 2011. "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan". *Jurnal At-Ta'dib Edisi Juli Vol. 6* (1). 111-125.
- Majoka dan Khan 2017. "Education Policy Provisions and Objectives. A Review of Pakistani Education Policies". *Italian Journal of Sociology of Education Volume 9 No.2* : 104-125.
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A*

*Methods Sourcebook, Edition  
3. USA: Sage Publications.*

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*.  
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Malang Tahun  
2016-2021.

Riyadi dan Bratakusumah. 2004.  
*Perencanaan Pembangunan  
Daerah Strategi Menggali  
Potensi dalam Mewujudkan  
Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.  
Gramedia Pustaka Utama.

Rizka, Wayan, dan Suharyani. 2018.  
*“Pelatihan Evaluasi Program  
Pendidikan Nonformal Bagi  
Pengelola Pusat Kegiatan  
Belajar Masyarakat (PKBM) di  
Kecamatan Gunungsari  
Kabupaten Lombok Barat”*.  
Jurnal Paradharma Volume 2  
No.1: 15 – 23.

Rosita. 2012. “Evaluasi pendidikan  
pemberantasan buta huruf di  
UPTD Sukoharjo”. *Journal of  
Social Education Vol. 2 ((2).*  
136-143.

Safitri dan Satmoko. 2017.  
“Implementasi Program  
Pengentasan Buta Huruf di  
Kabupaten Bondowoso”. *Jurnal  
Kajian Moral dan Warga  
Negaraan* Volume 5 No. 2: 640-  
655.

Sjafrizal. 2016. “*Perencanaan  
Pembangunan Daerah dalam  
Era Otonomi*”. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada.

Solihin. 2012. “*ANALISIS  
KEBIJAKAN: Dari Formulasi  
Ke Penyusunan Model-Model  
Implementasi Kebijakan  
Publik*”. Jakarta: PT. Bumi  
Aksara.

Sugiyono, 2014. “*Memahami  
Penelitian Kualitatif*”. Bandung:  
Alfabeta.

